



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMBELIAN KAPAL SELAM SRVS UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PENYELAMATAN DI LAUT

Aryojati Ardipandanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
aryojati.ardipandant@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kembali memperkuat alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan membeli kapal selam dari Inggris. Kali ini, giliran TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang akan mendapatkan alutsista baru berupa Submarine Rescue Vehicle System (SRVS). SRVS merupakan kapal selam yang berfungsi untuk mengevakuasi awak kapal selam yang tenggelam. Pengadaan SRVS dilakukan melalui penandatanganan Kemenhan dengan PT BTI Indo Tekno pada 1 September 2023.

Kapal selam merupakan alutsista strategis yang berperan penting bagi angkatan laut di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan penandatanganan kontrak SRVS tersebut, Indonesia akan menjadi operator SRVS tercanggih di kawasan, mendongkrak kemampuan dan kesiapan tempur armada kapal selam Indonesia, serta menjamin keselamatan kru yang mengoperasikannya. TNI AL dengan Komando Operasi Kapal Selam (Koopkasel) sebagai operator armada kapal selam di Indonesia akan mengoperasikan perangkat ini. Kemenhan menyebut pengadaan SRVS adalah salah satu bukti keseriusan Menhan RI, Prabowo Subianto, mendukung modernisasi alutsista di TNI AL.

Pada 12 September 2023, bertepatan dengan diadakannya *Defence and Security Equipment International* (DSEI) expo di London, bertempat di atas kapal perang fregat Type-23 milik Royal Navy, HMS Iron Duke, telah berlangsung penandatanganan *tripartite agreement* antara PT BTI Indo Tekno, SMP (Submarine Manufacturing & Products Ltd.), dan Houlder Ltd., untuk pemenuhan kontrak SRVS. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumatha, menyebutkan bahwa nilai kontrak pembelian itu mencapai 100 juta dollar AS atau sekitar Rp1,5 triliun.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Mayjen TNI Muhammad Fadjar, sebagai perwakilan resmi dari Kemenhan RI, dan Richard Graham MP, Utusan Perdagangan Perdana Menteri Inggris untuk Indonesia dan ASEAN. Turut menyaksikan bersama para perwakilan resmi, Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto, dan Kepala Divisi Dirgantara dan Pertahanan, UK Export Finance, Pat Cauthery.

Dirancang dan dibangun oleh SMP Ltd. di Inggris, SRV-F Mk.3 masuk dalam jajaran SRVS paling canggih di dunia. Desainnya yang revolusioner memberikan keuntungan dibanding sistem lain yang digunakan oleh negara-negara tetangga. Dengan berpegang pada prinsip *"One Out, All Out"*, SRV-F Mk.3 mampu menyelamatkan hingga 50 awak kapal selam sekaligus, memungkinkan evakuasi total seluruh awak dari kapal selam kelas Nagapasa dan Tipe 214 dalam operasi penyelamatan tunggal.

SRV-F Mk.3 mengadopsi desain *hybrid*, memungkinkan untuk diangkut pesawat udara dan dilengkapi dengan *mothership* (MOSHIP) yang dirancang khusus. Solusi *hybrid* ini menawarkan fleksibilitas dan responsivitas yang lebih baik dibandingkan sistem *flyaway* konvensional, yang

sering kali terhambat oleh berbagai ketergantungan teknis sehingga dapat berakibat fatal dalam operasi penyelamatan. MOSHIP dalam sistem ini akan dilengkapi dengan peralatan pendukung berteknologi tinggi, termasuk ruangan *Transfer Under Pressure* (TUP) dan ruangan dekompresi *on-board*, memastikan pertolongan medis segera kepada awak kapal selam yang berhasil diselamatkan.

Dalam rangka peringatan berdirinya armada kapal selam Indonesia, TNI AL bersiap untuk mempersembahkan salah satu sistem penyelamatan kapal selam paling unggul di dunia atas inisiasi Kementerian Pertahanan Indonesia. Keputusan untuk mengadopsi SRVS merupakan bagian dari visi strategis Menhan RI, Prabowo Subianto. Dalam upayanya meningkatkan kapabilitas TNI AL, SRVS akan memperkuat armada kapal selam Indonesia, dan memastikan keamanan dan keselamatan awak kapal selam yang dengan tulus berdedikasi dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Atensi DPR RI

Mengingat selama ini Kemenhan RI sering melakukan pembelian alat peralatan pertahanan dari luar negeri, lepas dari alasan logis manfaat dan kegunaannya menurut Kemenhan RI, Komisi I DPR RI perlu mengingatkan kembali bahwa setiap pembelian alat peralatan pertahanan dari luar negeri, harus selalu dikonsultasikan sebelumnya dengan Komisi I DPR RI untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, ayat (1) yang berbunyi "Dalam hal kebutuhan mendesak, pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dapat dilakukan dengan pembelian langsung". Pada ayat (2) disebutkan "Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR".

Komisi I DPR RI juga perlu mengingatkan agar Kemenhan RI menjamin terselenggaranya tindak lanjut dari pembelian kapal selam SRVS tersebut berupa alih atau transfer teknologi sesuai amanat Undang-Undang Industri Pertahanan, agar ke depan Indonesia tidak tergantung pada Inggris dalam memelihara kapal selam tersebut.

Sumber

antaranews.com, 14 September 2023;
kemenhan.go.id, 13 September 2023;
kompas.com, 11 September 2023;
lenteratoday.com, 12 September 2023;
UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.